

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu hal yang penting dan wajib didalam penyelenggaraan negara. Disetiap aspek kehidupan pasti akan terdapat nilai-nilai pembangunan didalamnya, hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya pembangunan, pemerintah seolah-olah tidak melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada dengan tujuan mencapai sebuah kemapanan. Todaro dalam Rakhmat menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.<sup>1</sup>

Didalam konteks Indonesia, pembangunan dapat dipisahkan menjadi 2 garis besar yaitu pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari proses pembangunan nasional. Dalam prosesnya pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat daerah secara terus

---

<sup>1</sup> Rakhmat. 2013. Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan : Graha Ilmu. Hal 1

menerus berdasarkan kemampuan daerah dan kemampuan nasional dengan memperhatikan perkembangan keadaan daerah.<sup>2</sup>

Pembangunan daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang memiliki azas desentralisasi dan otonomi daerah, oleh karenanya setiap daerah berhak untuk mengelola urusan rumahtangganya sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah disebut juga sebagai daerah Otonom, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

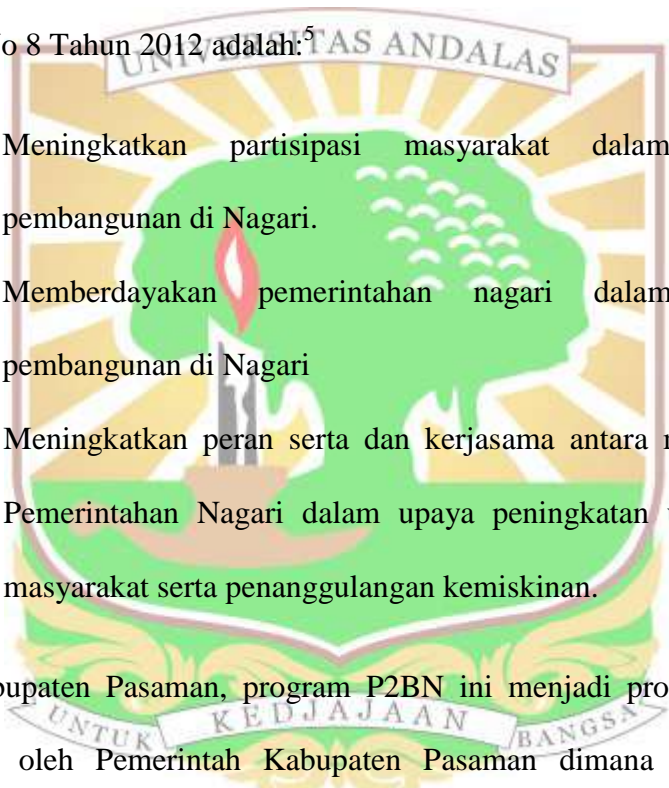
Disinilah peran pemerintah daerah diuji kesiapannya dalam mengelola daerah, karena setiap pemerintah daerah dituntut untuk bisa memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Untuk tercapainya upaya tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pasaman mencanangkan suatu terobosan melalui sebuah program unggulan yaitu Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari yang selanjutnya disebut (P2BN) yang mulai dijalankan pada tahun 2011 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari. Disamping itu program ini merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal 49

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Program P2BN adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut TPK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nagari dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan alokasi dana khusus nagari dan sumber lainnya yang tidak mengikat<sup>4</sup>. Program P2BN ini dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat Nagari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Adapun tujuan dari pelaksanaan program tersebut yang tertuang dalam Perda No 8 Tahun 2012 adalah:<sup>5</sup>

- 
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari.
  - b. Memberdayakan pemerintahan nagari dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari
  - c. Meningkatkan peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintahan Nagari dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Di Kabupaten Pasaman, program P2BN ini menjadi program unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dimana sumber utama pendanaan program ini berasal dari Alokasi Dana Khusus Nagari (ADKN) yang tercantum dalam APBD setiap tahun dimulai dari tahun 2011 dan ditunjang oleh swadaya Masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kasubid Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

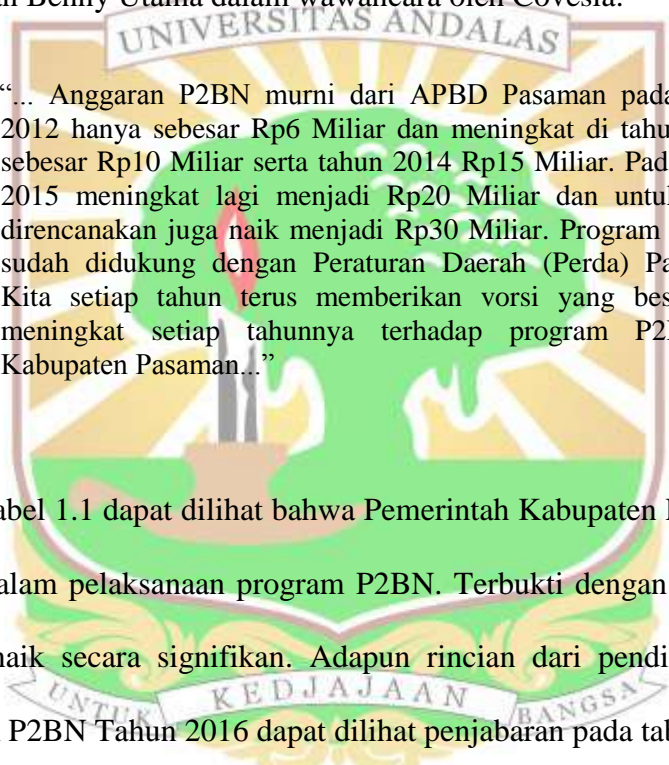
---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari

“...Program ini adalah salah satu program unggulan yang dijalankan dan menjadi prioritas dalam hal pembangunan di Kabupaten Pasaman...” (Wawancara dengan Benhard, Kasubid Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tanggal 8 Oktober 2016)

Hal ini juga didukung dengan adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dialokasikan dalam Alokasi Dana Khusus Nagari (ADKN) dimana setiap tahunnya alokasi anggaran untuk program ini selalu meningkat dari awal program ini dilaksanakan, sesuai dengan penuturan Bupati Pasaman Benny Utama dalam wawancara oleh Covesia.<sup>6</sup>



“... Anggaran P2BN murni dari APBD Pasaman pada tahun 2012 hanya sebesar Rp6 Miliar dan meningkat di tahun 2013 sebesar Rp10 Miliar serta tahun 2014 Rp15 Miliar. Pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp20 Miliar dan untuk 2016 direncanakan juga naik menjadi Rp30 Miliar. Program ini pun sudah didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) Pasaman. Kita setiap tahun terus memberikan porsi yang besar dan meningkat setiap tahunnya terhadap program P2BN di Kabupaten Pasaman...”

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman benar-benar serius dalam pelaksanaan program P2BN. Terbukti dengan anggaran yang setiap tahun naik secara signifikan. Adapun rincian dari pendistribusian dana untuk program P2BN Tahun 2016 dapat dilihat penjabaran pada tabel berikut :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling sedikit mendapatkan alokasi dana khusus untuk Program P2BN adalah Kecamatan Rao dengan anggaran 1,5 miliar untuk tujuh belas kegiatan P2BN dan yang paling banyak adalah Kecamatan Lubuk Sikaping dengan anggaran 4,5 miliar untuk 42 kegiatan. Atas dasar data yang dipaparkan diatas maka peneliti akan

<sup>6</sup> <http://m.covesia.com/berita/7508/4-tahun-berjalan-anggaran-p2bn-terus-meningkat-di-pasaman.html> diakses pada tanggal 20 September 2016 jam 23.34

memfokuskan penelitian pada Kecamatan Lubuk Sikaping. Adapun kegiatan Program P2BN yang dilaksanakan pada Kecamatan Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

Pada tingkat nasional program P2BN juga telah mendapat apresiasi oleh pemerintah pusat, dimana Kabupaten Pasaman menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten yang mendapatkan penghargaan “Parasamya Purnakarya Nugraha” atas prestasi kinerja pemerintah daerah yang telah tiga kali berturut-turut dinilai berkinerja tinggi. Parasamya Purnakarya Nugraha sendiri adalah suatu Tanda Kehormatan yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat.<sup>7</sup>

Program P2BN menjadi salah satu Indikator dalam penilaian penghargaan tersebut dimana hal yang sangat menentukan adalah adanya inovasi daerah yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga didukung oleh berita salah satu media online yang menyebutkan

“...untuk bidang infrastruktur, juga ada program P2BN. Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Nagari (P2BN) tersebut mempunyai dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Prasamya Purnakarya Nugraha

Pembangunan Berbasis Nagari telah dialokasikan dana sebesar Rp6 miliar...<sup>8</sup>

### Gambar 1.1

#### Penerimaan Penghargaan Pramsamya Purnakarya Nugraha



*Sumber : Media Online Pasaman News*

Secara umum pelaksanaan program P2BN bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Nagari, dengan mendorong kemandirian dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. P2BN sendiri dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat dan kemiskinan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat dibantu oleh program P2BN adalah seperti sarana/prasarana pertanian, sarana/prasarana penunjang usaha pertanian, pasar nagari atau fasilitas/pusat ekonomi masyarakat, kegiatan kelompok masyarakat yang mengarah pada percepatan penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>8</sup> Harian Haluan, Bupati Pasaman Terima Parasamya Purnakarya Nugraha, <http://harianhaluan.com/news/detail/52528/bupati-pasaman-terima-parasamya-purnakarya-nugraha>, Diakses tanggal 18 april 2017 pukul 17.38

**Tabel 1.4**  
**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2016**

Indikator	2015	2016
<b>Garis kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)</b>	272 779	307 552
<b>Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)</b>	21.880	20.83
<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	8.14	7.65

*Sumber: BPS Sumatera Barat 2016*

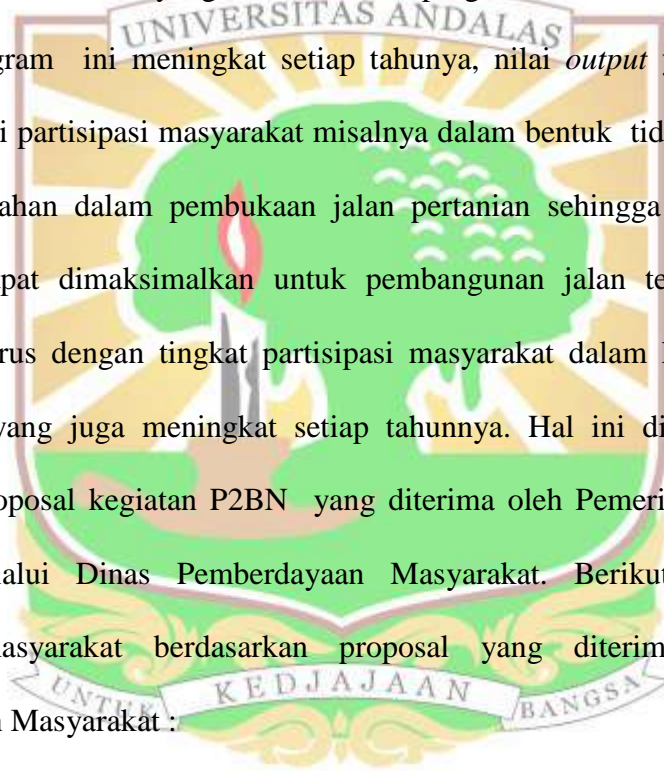
Dari Tabel 1.2 dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pendapatan perkapita/bulan/Rupiah pada tahun 2015 sebanyak 272 779 meningkat menjadi 307 552 pada tahun 2016. Jumlah penduduk miskin dari angka 21.880 jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 20.83. disamping itu jika dilihat dari persentase penduduk miskin pada Tahun 2015 berkisar pada angka 8.14% mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 7.65. Dari angka tersebut dapat dilihat ada indikasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman karena adanya program P2BN karena pada tahun tersebut program ini sudah dilaksanakan dan mengalami kemajuan pesat dengan dinaikan alokasi dananya dalam APBD pada dua tahun tersebut.

Jika dilihat dari tujuan Program P2BN yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan juga upaya pengentasan kemiskinan, program ini cukup memberikan pengaruh bagi masyarakat Kabupaten Pasaman. Dilihat dari segi partisipasi masyarakat, program ini mampu merangsang dan

menumbuhkan nilai-nilai partisipatif, seperti yang dikatakan Bupati Pasaman Benny Utama dalam wawancara media *online* Duakotopas<sup>9</sup> :

“Pelaksanaan P2BN selama ini diusulkan oleh masyarakat melalui pemerintah nagari, kemudian pengerjaannya pun dikembalikan kepada perangkat kerja di kenagarian. Biasanya, anggaran 100 juta bisa menghasilkan ouput pembangunan hingga 150 sampai 200 juta. Karena adanya nilai partisipasi masyarakat setempat”.

Dari sumber data yang ada di dalam program P2BN, dijelaskan bahwa anggaran program ini meningkat setiap tahunnya, nilai *output* yang bertambah bersumber dari partisipasi masyarakat misalnya dalam bentuk tidak adanya biaya pembebasan lahan dalam pembukaan jalan pertanian sehingga anggaran yang disediakan dapat dimaksimalkan untuk pembangunan jalan tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan di program ini yang juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan banyaknya proposal kegiatan P2BN yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Berikut tabel tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat :



<sup>9</sup> <http://www.duakotopas.com/2015/05/program-pembangunan-partisipatif.html> diakses tanggal 21 September 2016 pukul 01.18 WIB



**Tabel 1.5**

**Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Proposal Yang Diterima Oleh  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

Kecamatan	2013		2014		2015		2016	
	Masuk	Disetujui	Masuk	Disetujui	Masuk	Disetujui	Masuk	Disetujui
<b>Tigo Nagari</b>	35	19	40	20	49	24	57	26
<b>Simpang Alahan Mati</b>	15	14	18	15	20	16	24	17
<b>Bonjol</b>	35	27	38	30	43	33	47	35
<b>Lubuk Sikaping</b>	70	31	78	35	85	39	92	42
<b>Panti</b>	25	18	27	20	30	22	33	24
<b>Duo Koto</b>	17	13	18	15	21	18	24	20
<b>Padang Gelugur</b>	25	19	29	25	33	30	36	31
<b>Rao</b>	20	10	25	14	28	16	31	17
<b>Rao Selatan</b>	19	14	23	19	27	23	29	24
<b>Rao Utara</b>	40	18	45	20	49	22	52	24
<b>Mapat tunggul</b>	23	19	26	21	27	23	29	26
<b>Mapat tunggul Selatan</b>	21	10	23	12	25	14	27	15
<b>Jumlah</b>	345	212	390	246	437	280	481	301

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman 2016*

Program ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pasaman sesuai dengan penuturan Bupati Pasaman Benny Utama dalam Jawa Pos.<sup>10</sup>

“...Selain untuk kelancaran akses masyarakat yang bertani, program itu bisa menekan angka pengangguran. Sejak ada P2BN, angka pengangguran di Pasaman berkurang dari 6.000 orang menjadi 2.000 orang. P2BN itu merupakan spirit Nagari. Tujuannya, memperkuat fungsi Nagari sebagai motor penggerak pembangunan...”

Dengan P2BN ini, masyarakat yang dulunya enggan membuka lahan tidur yang mereka miliki karena tidak adanya infrastruktur jalan untuk membawa hasil pertanian, sekarang dengan adanya kegiatan pembangunan seperti pembukaan jalan usaha tani, jalan perkebunan, dan lainnya, masyarakat akhirnya mau membuka lahan baru.

Wewenang untuk mengelola program ini telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari dan dilengkapi dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/651/BUP-PAS/2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Khusus Nagari Untuk Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari 2016. Sedangkan Dinas yang akan menjadi *Leading Sector* dari program ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman adalah<sup>11</sup> :

Tugas :

<sup>10</sup> <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/18563/bupati-benny-utama-dan-reformasi-birokrasi-di-kabupaten-pasaman-sumatera-barat> diakses pada tanggal 21 September 2016 Pukul 00.01

<sup>11</sup> BPM.Pasamankab.go.id/pages-tugas-fungsi. Diakses pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 02.00 WIB

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsi

Untuk kelancaran program ini dibentuk tiga tim yaitu diantaranya Tim Verifikasi, Tim Koordinasi, Tim Teknis. Dalam melaksanakan tugas semua tim tersebut bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pasaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dimana setiap tim memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Adapun tupoksi dari tim verifikasi adalah Meneliti proposal usulan yang diajukan oleh Pemerintah Nagari Melakukan verifikasi lapangan terhadap setiap usulan kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Nagari , Menetapkan hasil verifikasi lapangan berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan administrasi, Membuat berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, Membahas rekapitulasi hasil dari tim verifikasi bersama tim koordinasi dan selanjutnya dilaporkan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan besaran

dan pemanfaatan DAK untuk pelaksanaan program P2BN bagi masing-masing nagari dalam dalam Kabupaten Pasaman, Memverifikasi kelengkapan administrasi setiap tahapan pencairan dan pelaporan DAK nagari setiap tahapan pelaksanaan program P2BN bagi masing-masing nagari dalam Kabupaten Pasaman, Membantu tim koodinasi dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan P2BN di lapangan, Membuat laporan kepada Bupati atas pelaksanaan P2BN bagi masing-masing nagari dalam Kabupaten Pasaman<sup>12</sup>.

Tupoksi dari Tim Koordinasi adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan P2BN di masing-masing nagari dalam Kabupaten Pasaman, melakukan pembinaan administrasi kegiatan dan memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan program, mengkoodinasikan setiap tahapan program, baik di tingkat Kabupaten maupun dengan aparatur kecamatan demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan setiap bulan kepada Bupati Pasaman.<sup>13</sup>

Sedangkan tupoksi dari tim teknis adalah melakukan inventarisasi terhadap usulan masing-masing Nagari, melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sketsa gambar kegiatan yang diusulkan oleh teknis kecamatan dan disetujui oleh Kepala UPT wilayah terkait, melakukan verifikasi dan/atau sertifikasi setiap tahapan-tahapan terhadap pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/951/BUP-PAS/2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2016

<sup>13</sup> Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/948/BUP-PAS/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2016

kegiatan/pekerjaan, melakukan pengawasan , monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan P2BN Di lapangan, merekomendasikan serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penilaian kegiatan/pekerjaan setiap tahapan pelaksanaandan tahap akhir kegiatan di lapangan bersama badan pengelola kegiatan dan tim pelaksana kegiatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya melakukan manajemen program P2BN Di Kabupaten Pasaman. Untuk melihat bagaimana program P2BN ini dijalankan dan dikelola sebagaimana mestinya diperlukan penerapan manajemen yang terencana dan terarah. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan program ini melibatkan banyak unsur didalamnya, dan setiap kegiatan dalam penyelenggaraannya tidak luput dari aktivitas manajemen.

Manajemen menurut George. R Terry sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>15</sup>

Fungsi-fungsi ini harus dilakukan dengan sebaik-sebaiknya mulai dari fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan

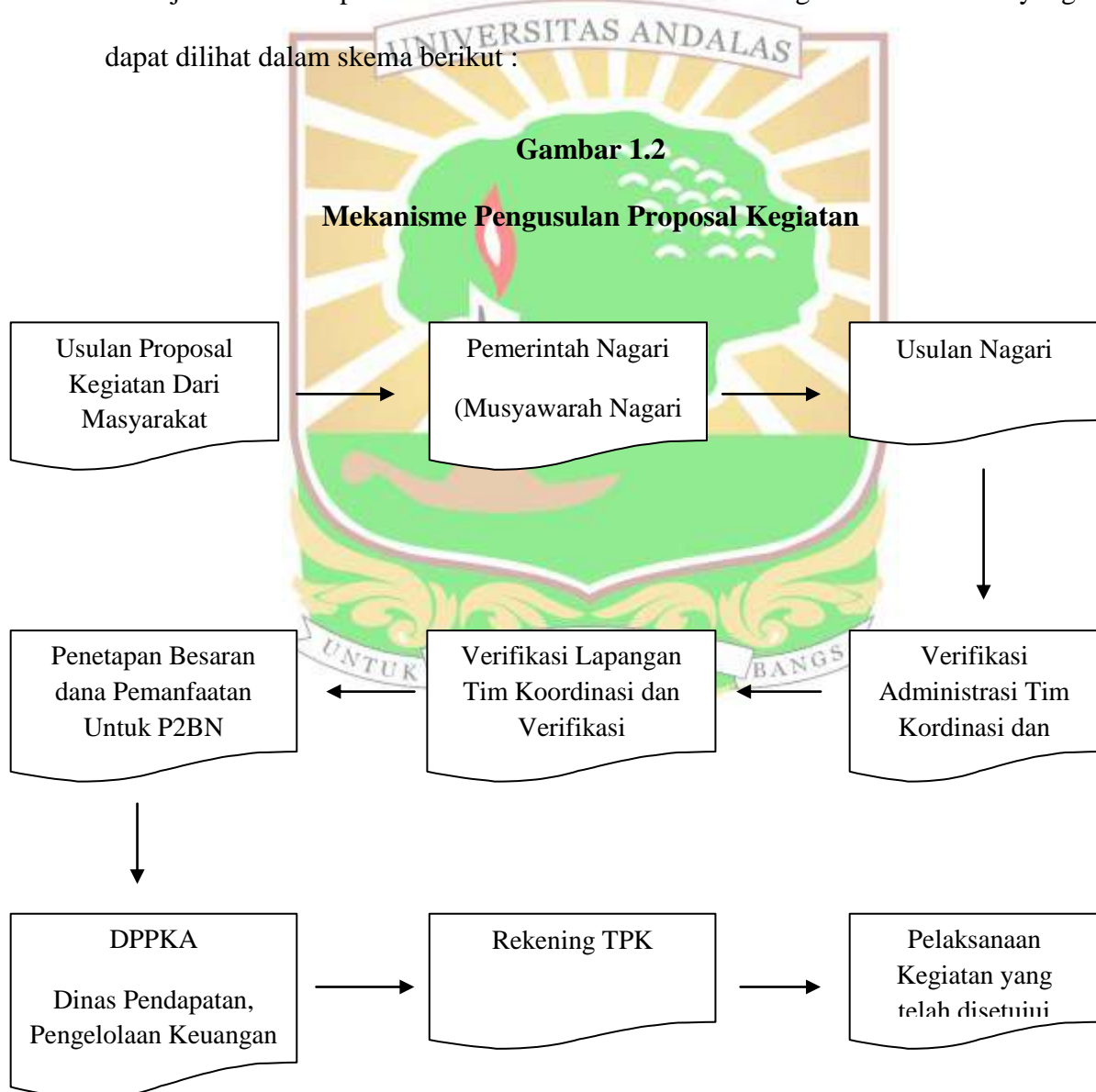
---

<sup>14</sup> Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/411/BUP-PAS/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2016

<sup>15</sup> Rosady ruslan, S.H M.M. Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012. Hal 1

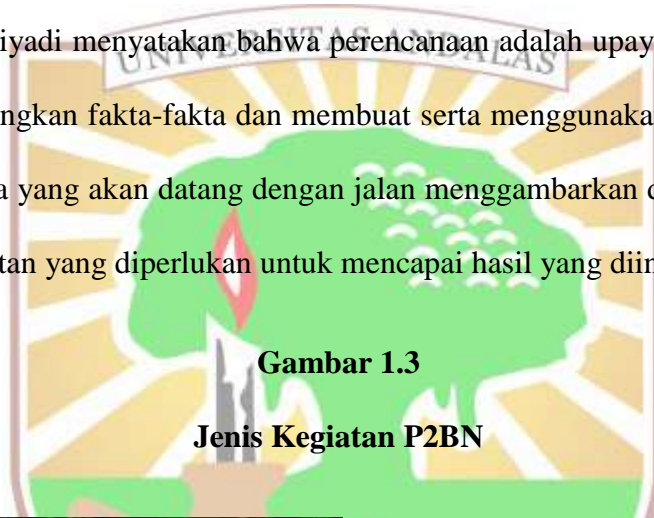
(actuating) dan pengawasan (controlling) agar pencapaian akhir sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan apabila terjadi kesalahan atau kendala selama proses pelaksanaan rencana tersebut dapat dilakukan tindakan antisipasi dan koreksi sedini mungkin.

Dalam pelaksanaan program ini memiliki tahap-tahap kegiatan yang tertera dalam Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/651/BUP-PAS/2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Khusus Nagari Tahun 2016 yang dapat dilihat dalam skema berikut :



Sumber : Peraturan Bupati Pasaman No 188.45/651/BUP-PAS/2016

Dari Skema Pada Gambar ada beberapa kegiatan yang dapat diusulkan dalam perencanaan kegiatan yaitu sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana penunjang usaha pertanian, pasar nagari atau fasilitas untuk pusat ekonomi masyarakat, kegiatan kelompok masyarakat yang mengarah pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini tidak lepas dari perencanaan awal dari program ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan menjadikan empat kegiatan tersebut menjadi alternatif kebijakan. George R. Terry dalam Riyadi menyatakan bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan<sup>16</sup>



**Gambar 1.3**  
**Jenis Kegiatan P2BN**



*Sumber : observasi awal penulis*

Selain itu pada tahap perencanaan dari program P2BN ini dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal 2

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

“...Bapak Benny Utama selaku Bupati menjelaskan bahwa tujuan dari program P2BN ini adalah untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang tidak tertampung dalam APBD Kabupaten Pasaman...” (Wawancara dengan Benhard, Kasubid Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pada Tanggal 22 oktober 2016)

Dari hasil wawancara peneliti diatas dapat dilihat bahwa dalam proses perencanaan program P2BN didasari atas banyaknya keinginan dan aspirasi masyarakat pasaman yang tidak terakomodir dalam penyusunan APBD sehingga muncul alternatif dalam perencanaan untuk melahirkan program P2BN itu sendiri.

Selain itu dalam kegiatan pengorganisasian, dalam membantu kelancaran dari program P2BN dibentuklah beberapa tim yaitu Tim Verifikasi, Tim Koordinasi, dan Tim Teknis. Akan tetapi, jika dilihat dalam tugas dan fungsi dari masing-masing tim dalam program P2BN terjadi kejanggalan dimana dalam hal pembagian kerja terkesan adanya terjadi tumpah tindih tugas dimana pada setiap tim sama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh TPK. sedangkan pengorganisasian menurut Terry dan Rue adalah proses pengelompokan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada pimpinan yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> George R.Terry dan Leslie W.Rue. *Dasar-Dasar Manajemen..* Jakarta. PT. Bumi Aksara. 2003. Hal.82



Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk melihat apakah kebijakan Kabupaten Pasaman tentang Program P2BN ini sudah mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus kegiatan manajemen program dengan judul **“Manajemen Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, bahwa manajemen mempunyai peran penting dalam suatu program, dimana dengan adanya manajemen yang baik maka pelaksanaan tugas dapat dicapai secara efektif dan efisien. Maka penulis merumuskan permasalahan pada penulisan ini yaitu **“Bagaimana Manajemen Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (P2BN) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman?”**

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mencari data dan informasi yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Manajemen Program P2BN oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan mengenai “Manajemen Program P2BN oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman” penulis jabarkan dibawah ini :

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penulisan ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu administrasi publik khususnya manajemen pelayanan publik.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

- Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui bentuk Manajemen Program P2BN oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.
- Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan program tersebut

